



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung, yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
7. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kapitalaung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampung dan unsur pendukung tugas Kapitalaung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam rangka penyusunan APBKampung; dan
- b. ADK dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Keuangan Kampung dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

Pagu ADK, Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp55.532.857.700,00 (lima puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

79

BAB III
PEMBAGIAN

Pasal 4

Pembagian ADK kepada setiap Kampung dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung; dan
- b. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 5

Rincian ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung.
- (2) ADK disalurkan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kampung.
- (3) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. untuk Bulan Januari yaitu:
 1. peraturan Kampung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung;
 2. rekomendasi camat; dan
 3. laporan pertanggungjawaban ADK, bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan Desember 2024; dan

- b. untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember yaitu:
1. rekomendasi camat; dan
 2. laporan pertanggungjawaban ADK serta bagian dari hasil Pajak dan Retribusi bulan sebelumnya.
- (4) Pemerintah Kampung harus melampirkan rekomendasi dari kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencairkan ADK.
- (5) Slip penarikan dana ADK wajib ditandatangani oleh Kapitalaung, sekretaris Kampung dan kepala urusan keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *nh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ADK UNTUK SETIAP KAMPUNG

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ADK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tabukan Utara	Kalasuge	471,585,000
2	Tabukan Utara	Bahu	429,585,000
3	Tabukan Utara	Mala	446,385,000
4	Tabukan Utara	Kalekube	454,785,000
5	Tabukan Utara	Naha	454,785,000
6	Tabukan Utara	Beha	463,185,000
7	Tabukan Utara	Utaurano	454,785,000
8	Tabukan Utara	Lenganeng	404,385,000
9	Tabukan Utara	Tarolang	404,385,000
10	Tabukan Utara	Tola	379,185,000
11	Tabukan Utara	Kalurae	353,985,000
12	Tabukan Utara	Bengketang	454,785,000
13	Tabukan Utara	Petta	454,785,000
14	Tabukan Utara	Bowongkulu	429,585,000
15	Tabukan Utara	Pusunge	328,785,000
16	Tabukan Utara	Moade	404,385,000
17	Tabukan Utara	Raku	404,385,000
18	Tabukan Utara	Petta Timur	429,585,000
19	Tabukan Utara	Petta Barat	353,985,000
20	Tabukan Utara	Petta Selatan	404,385,000
21	Tabukan Utara	Likuang	505,185,000
22	Tabukan Utara	Kalekube I	353,985,000
23	Tabukan Utara	Bowongkulu I	353,985,000
24	Tabukan Utara	Naha I	353,985,000
25	Nusa Tabukan	Nanedakele	394,174,000
26	Nusa Tabukan	Nusa	444,574,000
27	Nusa Tabukan	Bukide	368,974,000
28	Nusa Tabukan	Bukide Timur	394,174,000
29	Nusa Tabukan	Nanusa	368,974,000
30	Manganitu Selatan	Kaluwatu	409,704,000
31	Manganitu Selatan	Laine	502,104,000
32	Manganitu Selatan	Lapango	401,304,000
33	Manganitu Selatan	Sowaeng	359,304,000
34	Manganitu Selatan	Ngalipaeng I	384,504,000
35	Manganitu Selatan	Ngalipaeng II	334,104,000
36	Manganitu Selatan	Batunderang	359,304,000
37	Manganitu Selatan	Bebalang	384,504,000
38	Manganitu Selatan	Mawira	334,104,000
39	Manganitu Selatan	Pindang	384,504,000
40	Manganitu Selatan	Lapepahe	359,304,000
41	Manganitu Selatan	Lehimi Tariang	334,104,000
42	Manganitu Selatan	Lapango I	384,504,000
43	Tatoareng	Kalama	469,774,000
44	Tatoareng	Kahakitang	394,174,000
45	Tatoareng	Mahengetang	368,974,000
46	Tatoareng	Para	394,174,000
47	Tatoareng	Dalako Bembanehe	444,574,000
48	Tatoareng	Taleko Batusaiki	444,574,000
49	Tatoareng	Para I	343,774,000
50	Tamako	Nagha I	359,304,000

(1)	(2)	(3)	(4)
51	Tamako	Nagha II	409,704,000
52	Tamako	Pokol	359,304,000
53	Tamako	Balane	359,304,000
54	Tamako	Binala	359,304,000
55	Tamako	Ulung Peliang	384,504,000
56	Tamako	Menggawa	434,904,000
57	Tamako	Kalinda	384,504,000
58	Tamako	B e b u	359,304,000
59	Tamako	Makalekuhe	359,304,000
60	Tamako	Pananaru	409,704,000
61	Tamako	D a g h o	434,904,000
62	Tamako	Mahumu	359,304,000
63	Tamako	Lelipang	359,304,000
64	Tamako	Menggawa II	384,504,000
65	Tamako	Kalama Darat	359,304,000
66	Tamako	Kalinda I	359,304,000
67	Tamako	Mahumu I	334,104,000
68	Tamako	Mahumu II	359,304,000
69	Tamako	Hesang	409,704,000
70	Manganitu	Tawoali	353,985,000
71	Manganitu	Barangka	404,385,000
72	Manganitu	Nahepese	353,985,000
73	Manganitu	Manumpitaeng	379,185,000
74	Manganitu	Taloarane	379,185,000
75	Manganitu	Mala	353,985,000
76	Manganitu	Karatung I	353,985,000
77	Manganitu	Karatung II	429,585,000
78	Manganitu	Kauhis	404,385,000
79	Manganitu	Sesiwung	404,385,000
80	Manganitu	Lebo	395,985,000
81	Manganitu	Barangkalang	404,385,000
82	Manganitu	Belengang	404,385,000
83	Manganitu	Bakalaeng	353,985,000
84	Manganitu	Hiung	353,985,000
85	Manganitu	Pinebentengang	353,985,000
86	Manganitu	Taloarane I	353,985,000
87	Manganitu	Bengka	328,785,000
88	Tabukan Tengah	Bowongkali	379,185,000
89	Tabukan Tengah	Kulur I	379,185,000
90	Tabukan Tengah	Kulur II	404,385,000
91	Tabukan Tengah	Bira	353,985,000
92	Tabukan Tengah	Kuma	404,385,000
93	Tabukan Tengah	Bungalawang	429,585,000
94	Tabukan Tengah	Miulu	379,185,000
95	Tabukan Tengah	Gunung	379,185,000
96	Tabukan Tengah	Talengen	379,185,000
97	Tabukan Tengah	Biru	379,185,000
98	Tabukan Tengah	Tariang Baru	353,985,000
99	Tabukan Tengah	Sensong	353,985,000
100	Tabukan Tengah	Rendingan	379,185,000
101	Tabukan Tengah	Palahanaeng	328,785,000
102	Tabukan Tengah	Timbelang	353,985,000
103	Tabukan Tengah	Pelelengen	328,785,000
104	Tabukan Tengah	Malueng	328,785,000
105	Tabukan Tengah	Kuma I	353,985,000
106	Tabukan Selatan	Simueng	359,304,000
107	Tabukan Selatan	Bentung	409,704,000

(1)	(2)	(3)	(4)
108	Tabukan Selatan	Lesabe	434,904,000
109	Tabukan Selatan	Malamenggu	359,304,000
110	Tabukan Selatan	Palareng	359,304,000
111	Tabukan Selatan	Binebas	359,304,000
112	Tabukan Selatan	Mandoi	359,304,000
113	Tabukan Selatan	Batuwingkung	359,304,000
114	Tabukan Selatan	Birahi	359,304,000
115	Tabukan Selatan	Laotongan	359,304,000
116	Tabukan Selatan	Bukide	359,304,000
117	Tabukan Selatan	Kalagheng	359,304,000
118	Tabukan Selatan	Lesabe I	359,304,000
119	Tabukan Selatan	Bulo	334,104,000
120	Kendahe	Kendahe I	379,185,000
121	Kendahe	Kendahe II	379,185,000
122	Kendahe	Talawid	404,385,000
123	Kendahe	Tariang Lama	404,385,000
124	Kendahe	Pempalaraeng	379,185,000
125	Kendahe	Mohong Sawang	404,385,000
126	Kendahe	Lipang	368,974,000
127	Kendahe	Kawaluso	394,174,000
128	Tabukan Selatan Tengah	Hangke	359,304,000
129	Tabukan Selatan Tengah	Salurang	409,704,000
130	Tabukan Selatan Tengah	Tambung	359,304,000
131	Tabukan Selatan Tengah	Beeng	359,304,000
132	Tabukan Selatan Tengah	Lehupu	359,304,000
133	Tabukan Selatan Tengah	Bowone	359,304,000
134	Tabukan Selatan Tengah	Beeng Laut	334,104,000
135	Tabukan Selatan Tengah	Tenda	359,304,000
136	Tabukan Selatan Tengah	Aha Patung	359,304,000
137	Tabukan Selatan Tenggara	Pintareng	460,104,000
138	Tabukan Selatan Tenggara	Basauh	384,504,000
139	Tabukan Selatan Tenggara	Tumalede	359,304,000
140	Tabukan Selatan Tenggara	Sampakang	359,304,000
141	Tabukan Selatan Tenggara	Dalokaweng	359,304,000
142	Tabukan Selatan Tenggara	Malisade	359,304,000
143	Kepulauan Marore	Marore	368,974,000
144	Kepulauan Marore	Kawio	368,974,000
145	Kepulauan Marore	Matutuang	343,815,700
TOTAL			55,532,857,700

7

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI